

## TAJUK RENCANA

### Reformasi Kalurahan

SABTU 3 September 2022 hari ini genap 10 tahun pemberlakuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (UUK DIY) yang ditandatangani oleh Presiden pada 31 Agustus 2012. Beberapa tema atau topik terkait Keistimewaan DIY telah muncul dari berbagai kegiatan dalam peringatan Satu Dasawarsa UUK DIY.

Dari beberapa topik yang dimunculkan oleh berbagai pihak, pernyataan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X merupakan salah satu topik yang menarik untuk disimak, yakni Reformasi Kalurahan. Dalam acara *Sapa Aruh* di Bangsal Kepatihan, Rabu (31/8) lalu, Gubernur DIY menegaskan arti penting reformasi kalurahan. Reformasi tersebut sangat penting agar 46 kalurahan dan 392 kalurahan di DIY menjadi pusat pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya.

Menurutnya, jika potensi keuangan dilancarkan dari kalurahan, maka kalurahan akan menjadi sentra pertumbuhan sekaligus menjadi ujung depan pemberantasan kemiskinan. Konsep tersebut juga relevan untuk mengakselerasi pembangunan kalurahan dalam mengejar kemajuan perkotaan. Sebab, sumber potensinya ada di kalurahan. Semua bermula pada reformasi kalurahan sebagai basis keistimewaan DIY.

Ditegaskan pula oleh Sri Sultan, Pemda DIY juga berkomitmen mewujudkan kalurahan sebagai *patrap Tri Muka* yang menjadikan kalurahan sebagai arena demokrasi politik dan ekonomi lokal. Itu merupakan wujud kedaulatan politik dan kedaulatan ekonomi. Kalurahan juga berperan dalam pemberdayaan masyarakat melalui aktualisasi pengetahuan kolektif warganya.

Reformasi yang dilakukan di tingkat kalurahan, tandas Gubernur DIY, dapat direalisasikan melalui pengembangan beragam program yang dimiliki. Masing-masing kalurahan bisa menggunakan danais dalam mengembangkan kalurahan, selain dana desa. Tanah kas desa dapat disewa untuk pengembangan usaha, dengan menggunakan danais. Misalnya untuk pengembangan sektor per-

anian. Dengan demikian bantuan danais untuk menyewa lahan, sehingga APBDes terus bertambah.

Sultan juga menjelaskan, saat ini sudah ada 10 kalurahan yang menjadi percontohan. Diharapkan kalurahan-kalurahan lain juga meniru 10 kalurahan percontohan dalam pemanfaatan danais untuk pemberdayaan masyarakat. Sepuluh kalurahan percontohan dimaksud, di antaranya Breksi, Mangunan, Nglanggeran, dan Gedangsari.

Sekretaris Daerah (Sekda) DIY Drs K Baskara Aji juga mengungkapkan, pada prinsipnya Gubernur bisa mendorong kalurahan dari dua hal. Pertama dari bantuan Gubernur kedua lewat Bantuan Khusus Keistimewaan (BKK). Ke depan, seluruh kalurahan di DIY akan mendapatkan BKK. Seperti diungkapkan Gubernur, dana yang disalurkan ke kalurahan seharusnya dimanfaatkan untuk investasi, bukan hanya konsumsi.

Peluang masyarakat memanfaatkan tanah kas desa untuk mengembangkan usaha sudah dibuka oleh Gubernur DIY. Tinggal bagaimana kesiapan Lurah dan Penrangkat Kalurahan mengimplementasikan *dhawuh* Sri Sultan Hamengku Buwono. Setelah ada Peraturan Gubernur DIY Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kalurahan, tentunya akan segera terbit kebijakan tentang reformasi kalurahan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Gubernur DIY juga telah menegaskan bahwa keistimewaan dapat berperan sebagai moderator antara nilai-nilai budaya yang telah tersemadi di masyarakat, untuk selanjutnya dipertemukan dengan nilai-nilai baru melalui pembelajaran. Semua itu selaras dengan gregat *Mangasah Mingising Budi*. Begitu pula dengan sosial-ekonomi, perlu memiliki peran budaya sebagai solusi pengentasan kemiskinan, kesenjangan sosial dan permasalahan yang terjadi di kalurahan.

Momentum satu dasawarsa UUK DIY tentunya juga menjadi payung hukum yang benar-benar istimewa untuk masyarakat dan pemerintah kalurahan. Kita tunggu saja realisasi reformasi kalurahan. □

## Pasal TPG Hilang dalam RUU Sisdiknas?

Joko Triyatno

diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen sebelum Undang-Undang ini diundangkan, tetap menerima tunjangan tersebut sepanjang masih memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ayat ini cukup jelas karena ketika nantinya RUU ini diundangkan maka akan menjadi aturan induk/*lex ge-*

long kategori ini adalah mereka yang baru secara kepegawaian maupun tidak memenuhi ketentuan jam minimal.

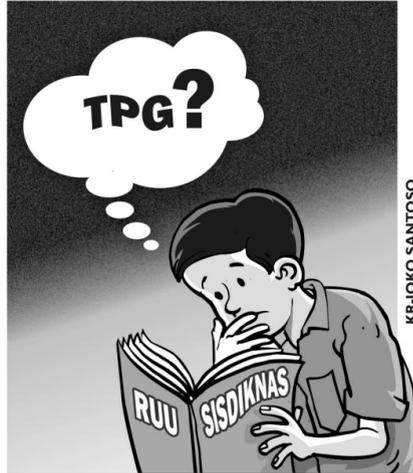
Pembacaan pasal 145 ayat (2) tersebut selanjutnya memberikan tafsir pada ayat (1) secara lebih lanjut terkait besaran tunjangan bagi guru dan dosen yang telah bersertifikat profesional. Berapa besaran tunjangan bagi guru dan dosen pada ayat (1)?

### Angin Segar

RUU Sisdiknas ini cukup memberikan angin segar bagi para guru dan dosen. Karena akan memberikan penghasilan yang layak. Namun redaksionalnya perlu diperjelas terkait besaran tunjangan yang akan diberikan negara kepada profesional pendidik di negeri ini. Keberadaan aturan pelaksanaan di bawah undang-undang yang lebih rigid diperlukan untuk lebih memberikan kepastian hukum.

Dari segi kepegawaian, ketentuan dalam ayat (2) ini memunculkan masalah baru jika dihadapkan pada status kepegawaian di luar PNS karena akan sulit menentukan standar kualifikasinya. Dan nampaknya ketentuan ini diperuntukkan hanya bagi kepegawaian berstatus PNS saja kecuali pemerintah membuat regulasi terkait sistem rekrutmen pegawai baru pada instansi non-negeri. □

\*) **Joko Triyatno Spd SH MPd,**  
Guru SMAN 1 Galur Kulonprogo



KR:JOKO SANTOSO

neralis menggantikan UU No. 14/2005 tentang Guru dan Dosen.

Ayat (2) RUU Sisdiknas berbunyi: Setiap guru dan dosen selain guru dan dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerima besaran penghasilan/pengupahan paling sedikit sama dengan penghasilan/pengupahan yang diterima saat Undang-Undang ini diundangkan sepanjang masih memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Artinya, guru dan dosen yang belum tersertifikasi akan menerima tambahan penghasilan paling sedikit sama (1 kali) dengan penghasilan/pengupahan yang diterima. Guru/ dosen yang tergo-

## PIKIRAN PEMBACA

Naskah berupa usulan, gagasan, apresiasi atau masalah layanan publik  
Naskah dikirim Email atau WA

pikiranpembaca@gmail.com 0895-6394-11000

dilampiri fotocopy/scan KTP, atau langsung ke Redaksi Kedaulatan Rakyat  
Jalan Margo Utomo 40-42 Yogyakarta 55323. Naskah tidak berisi ujaran kebencian, SARA dan Hoaks. Isi menjadi tanggungjawab penulis.

### Ayo Jangan Ketinggalan Vaksinasi Booster

PANDEMI covid-19 melandai, ternyata juga bahaya yang belum mengikuti vaksinasi booster I. Padahal, pemerintah bahkan sudah membuat sinyal akan hadirnya vaksinasi booster kedua. Beberapa kalangan malah sudan melaksanakannya vaksinasi booster kedua.

Meski demikian, setelah mengikuti vaksinasi I dan II, masih banyak yang belum mendaftar vaksinasi booster I, bahkan merasa abai. Merasa bila pandemic telah melandai dan sudah duakali vaksinasi, sehingga enggan melaksanakan vaksinasi booster I. Memang ada yang abai, ada yang takut apalagi banyak kisah dampak sampingnya yang sakit luar biasa dan

juga ada karena malas mengikuti. Namun kini Kementerian Perhubungan telah menerapkan vaksinasi booster menjadi salah satu syarat perjalanan transportasi umum. Sehingga banyak penumpang KA dari Stasiun Tugu Yogyakarta gagal berangkat. Karena vaksinasi ketiga atau vaksinasi booster telah menjadi persyaratan untuk sarana transportasi terutama untuk jarak jauh kereta api. Karena itu ayo jangan ketinggalan vaksinasi booster. Janganlah abai, jangan malas dan jangan takut untuk mengikuti vaksinasi booster I dan II nanti. Ini menjamin keselamatan kita sendiri juga. □

Fariza, Minomartani

## Harta, Kuasa dan Asmara

Edy Purwo Saputro

(QS Ibrahim ayat 7).

### Perilaku Buruk

Apa yang terjadi dan viral sebulan terakhir tidak bisa terlepas dari perilaku kufur nikmat karena terlena dan terbuai dengan gelimang harta sebagai konsekuensi dari jabatannya. Imbas dari itu semua adalah pelarian terhadap perbuatan yang tidak terpuji yaitu sikap dan perilaku perselingkuhan dan zina. Ironisnya, perselingkuhan di era kekinian seperti dianggap. Kian miris, perilaku buruk ini tidak hanya dilakukan kalangan atas, *the haves*, pejabat ataupun di perkotaan. Namun juga dilakukan rakyat jelata dan di pedesaan.

Perselingkuhan dan zina tidak hanya dilakukan kalangan atas, *the haves*, pejabat tetapi juga banyak diberitakan dilakukan kalangan jelata. Tidak hanya di perkotaan, tapi juga di pedesaan. Bahkan, dari pendidik seperti dosen juga ada. Fakta ini tentu memicu keprihatinan karena tidak saja mencoreng nama baik kampusnya tapi juga meninggalkan jejak kepada keluarga dan akan berdampak terhadap kredibilitas *bibit, bobot, bebet*. Ironisnya. Apa yang terjadi tidak jadi pembelajaran tapi justru ikutan melakukan kejahatan.

### Sikap Rasional

Harta, kuasa dan asmara sampai akhir zaman akan menjadi godaan - ujian untuk

bisa menyadarkan manusia. Tidak ada kata terlambat untuk sadar bahwa syukur itu penting. Sehingga mampu ereduksi dan meminimalisasi godaan untuk tidak larut dalam daya tarik perselingkuhan yang di era kekinian semakin terbuka saja peluangnya.

Jadi, gelimang harta yang diperoleh karena tahta dan jabatan yang diemban bisa sangat berisiko terhadap godaan perempuan, asmara. Artinya, pilihan untuk sikap rasional ada dua yaitu: 'nikmat manalagi yang kita dustakan' atau 'dusta manalagi yang kita nikmati'. Semoga kasus yang viral dalam sebulan terakhir bisa menjadi pembelajaran bagi kita. □

\*) **Dr Edy Purwo Saputro**, Dosen Pascasarjana di Universitas Muhammadiyah Solo

## Pojok KR

Pembukaan Porda XVI DIY 2022 berlangsung di Sleman meriah dan termegah.

-- Wah dan tidak murah.

\*\*\*

Pemda DIY dan Pemkab Trenggalek Jawa Timur merajut ulang budaya Mataram.

-- Rajutan benang emas.

\*\*\*

Layanan cetak mandiri KTP elektronik di Kota Yogya menunggu sinkronisasi.

-- Sampai kapan?

*Beraba*

## Kedaulatan Rakyat

SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers) No. 127/SK/MENPEN/SIUPP/A.7/1986 tanggal 4 Desember 1990. Anggota SPS. ISSN: 0852-6486.

Penerbit: PT-BP Kedaulatan Rakyat Yogyakarta, Terbit Perdana: Tanggal 27 September 1945.

Perintis: H Samawi (1913 - 1984) M Wonohito (1912 - 1984).

Penerus: Dr H Soemadi M Wonohito SH (1985-2008), dr H Gun Nugroho Samawi (2011-2019). **Penasihat:** Drs HM Idham Samawi. **Komisaris Utama:** Prof Dr Inajati Adrisjanti. **Direktur Utama:** M Wirnon Samawi SE MIB. **Direktur Pemasaran:** Fajar Kusumawardhani SE. **Direktur Keuangan:** Imam Satriadi SH. **Direktur Umum:** Yurija Nugroho Samawi SE MM MSc. **Direktur Produksi:** Baskoro Jati Prabowo SSoS.

**Pemimpin Umum:** M Wirnon Samawi SE MIB. **Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab:** Drs H Octo Lampito MPd. **Wakil Pemimpin Redaksi:** Drs H Ahmad Luthfie MA. Ronny Sugiantoro SPd, SE, MM. **Redaktur Pelaksana:** Primaswolo Sudjono SPt, Joko Budhiarto, Mubashada, Drs Widyo Suprayogi. **Manajer Produksi Redaksi:** Ngabdul Wakid. **Redaktur:** Dra Hj Fadmi Sustiwi, Dra Prabandari, Benny Kusumawan, Drs H Hudono SH, Drs Swasto Dayanto, Husein Effendi SSI, Hanik Afifiati, MN Hassan, Drs Jayadi K Kastari, Subchan Mustafa, Drs Hasto Sutadi, Muhammad Fauzi SSos, Drs Mukti Haryadi, Retno Wulandari SSos, H M Sobirin, Linggar Sumukti, Daryanto Widagdo, Latief Noor Rochmans. **Fotografer:** Eddy Widjono Putro, Surya Adi Lesmana. **Grasis:** Joko Santoso SSn, Bagus Wijanarko. **Sekretaris Redaksi:** Dra Hj Supriyanti.

**Pemimpin Perusahaan:** Fajar Kusumawardhani SE. **Kepala TU Langganan:** Drs Asri Salman, Telp (0274)- 565685 (Hunting)

**Manajer Iklan:** Agung Susilo SE, Telp (0274) - 565685 (Hunting) Fax: (0274) 555660. E-mail: iklan@kr.co.id, iklnkrkyk23@yahoo.com, iklnkrkyk13@gmail.com.

Langganan per bulan termasuk 'Kedaulatan Rakyat Minggu'... Rp 90.000,00, Iklan Umum/Display... Rp 27.500,00/mm klm, Iklan Keluarga... Rp 12.000,00/mm klm, Iklan Baris/Cilik (min. 3 baris, maks. 10 baris)... Rp 12.000,00 /baris, Iklan Satu Kolom (min. 30 mm, maks. 100 mm) Rp 12.000,00 /mm klm, Iklan Khusus: Ukuran 1 klm x 45 mm... Rp 210.000,00, (Wisuda lulus studi D1 s/d S1, Pernikahan, Ulang Tahun) ● Iklan Warna: Full Colour Rp 51.000,00/mm klm (min. 600 mm klm), Iklan Kuping (2 klm x 40 mm) 500% dari tarif. Iklan Halaman I: 300 % dari tarif (min. 2 klm x 30 mm, maks. 2 klm x 150 mm). Iklan Halaman Terakhir: 200% dari tarif. Tarif iklan tersebut belum termasuk PPN 10%

**Alamat Kantor Utama dan Redaksi:** Jalan Margo Utomo 40, Gowongan, Jetis, Yogyakarta, 55232. Fax (0274) - 563125, Telp (0274) - 565685 (Hunting)

**Alamat Percetakan:** Jalan RayaYogya - Solo Km 11 Sleman Yogyakarta 55573, Telp (0274) - 496549 dan (0274) - 496449. Isi di luar tanggungjawab percetakan

**Alamat Homepage:** http://www.kr.co.id dan www.krjogja.com. **Alamat e-mail:** naskahkr@gmail.com. **Radio:** KR Radio 107.2 FM.

**Bank:** Bank BNI - Rek: 003.0440.854 Cabang Yogyakarta.

**Perwakilan dan Biro:**

**Jakarta:** Jalan Utan Kayu No. 104B, Jakarta Timur 13120, Telp (021) 8563602/Fax (021) 8500529. **Kuasa Direksi:** Ir Ita Indirani, Wakil Kepala Perwakilan: Hariyadi Tata Raharja.

**Wartawan:** H Imong Dewanto (Kepala Biro), H Ishaq Zubaedi Raqib, Syaifullah Hadmar, Muchlis Ibrahim, Rini Suryati, Ida Lumongga Ritonga.

**Semarang:** Jalan Lampersari No 62, Semarang, Telp (024) 8315792. **Kepala Perwakilan:** Budiono Isman, Wakil: Isdiyanto Isman SIP. **Banyumas:** Jalan Prof Moh Yamin No. 18, RT 7 RW 03 Karangklesem, Purwokerto Selatan, Telp (0281) 622244. **Kepala Perwakilan:** Ach Pujiyanto SPd, Wakil: Driyanto.

**Klaten:** Jalan Pandanaran Ruko No 2-3, Bendogantungan Klaten, Telp (0272) 322756. **Kepala Perwakilan:** Sri Warsiti. **Magelang:** Jalan Achmad Yani No 133, Magelang, Telp (0293) 363552, Wakil: Drs M Thoha. **Kulonprogo:** Jalan Veteran No 16, Wates, Telp (0274) 774738. **Kepala Perwakilan:** Suprpto, SPd, Wakil: Asrul Sani. **Gunungkidul:** Jalan Sri Tanjung No 4 Purwosari, Wonosari, Telp (0274) 393562. **Kepala Perwakilan:** Drs Guno Indarjo, Wakil: Wuragil Dedy TP